



***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT**

(Studi Kasus Kampung *Heritage* Kayutangan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang

Oleh:

SALVA AMALIA SUBEKTI

NPM. 22001091042



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

MALANG

2024

RINGKASAN

Salva Amalia Subekti, 2024, *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kampung Heritage Kayutangan), (1) Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, (2) Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol., Sc

Kampung *Heritage* Kayutangan merupakan kampung dibawah pemerintahan Kota Malang. Kampung *Heritage* Kayutangan merupakan salah satu Kampung yang konsepnya memiliki sejarah peninggalan colonial belanda yang tempatnya strategis di daerah jalan satu arah kayutangan. Dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat dilakukan tiga *stakeholders* yaitu masyarakat, pemerintah dan pihak swasta kampung *heritage* Kayutangan. Dalam pelaksanaan *collaborative governance* yang dilakukan oleh tiga *stakeholders* sudah memberikan banyak dampak dengan meningkatnya UMKM dari masyarakat sekitar kampung *heritage* kayutangan. Dengan adanya dukungan dari pokdarwis dan pemerintah dalam melakukan pengelolaan ini akan terus memberikan hasil yang pasti untuk warga yang merasakan dampak tersebut di kampung *heritage* Kayutangan.

Peneliti menggunakan tiga teori utama dalam penelitian ini. *Collaborative Governance* oleh Ansel Gash (dalam Astuti, dkk., 2020) menjelaskan bahwa *Collaborative Governance* metode pengelolaan pemerintah yang melibatkan pemangku kepentingan di luar instansi tujuan pemerintah, bermusyawarah dan kesepakatan pengambilan keputusan dengan implementasi program dan kebijakan publik. Teori kedua oleh Wheelen dan Hunger (Abd. Rahman dkk., 2017), yang menjelaskan proses-proses manajemen strategi, yaitu pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol. Teori yang ketiga oleh Ismayanti (2020) yang menjelaskan dampak pariwisata yaitu, dampak ekonomi, sosial budaya, lingkungan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan gaya Miles dan Huberman. Peneliti

menggunakan sembilan orang informan mulai dari pemerintah, kelompok sadar wisata, dan masyarakat kampung *heritage* kayutangan. Kemudian, peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Collaborative Governance* dilakukan secara berkelanjutan berbasis masyarakat benar adanya di kampung *heritage* kayutangan dapat dilihat dengan terlibatnya masyarakat lokal sebagai pelaku UMKM dilokasi wisata. Selain itu dalam *collaborative governance*, pemerintah Kelurahan Kauman atau intitusi dari luar seperti Dinas Pariwisata Kota Malang, Kementerian PUPR Kota Malang, serta Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, dan kelompok sadar wisata, serta pihak swasta berhasil merencanakan serta menjalankan beberapa strategi kedepannya dalam pengelolaan kampung *heritage* kayutangan. Meskipun demikian, tantangan besar menjadi faktor penghambat dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata dan pelestarian lingkungan, seperti vandalisme, kerusakan infrastruktur, dan peningkatan sampah, masih menjadi kendala yang memerlukan perhatian lebih. Faktor pendukung utama adalah partisipasi aktif masyarakat dan kerjasama lintas sektor, namun tantangan tetap ada, terutama dari kurangnya keterlibatan sebagian masyarakat, komunikasi yang tidak efisien, serta masalah keamanan dan kebersihan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi *collaborative governance* dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat.

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Berkelanjutan, Berbasis Masyarakat, Kampung *Heritage* Kayutangan

SUMMARY

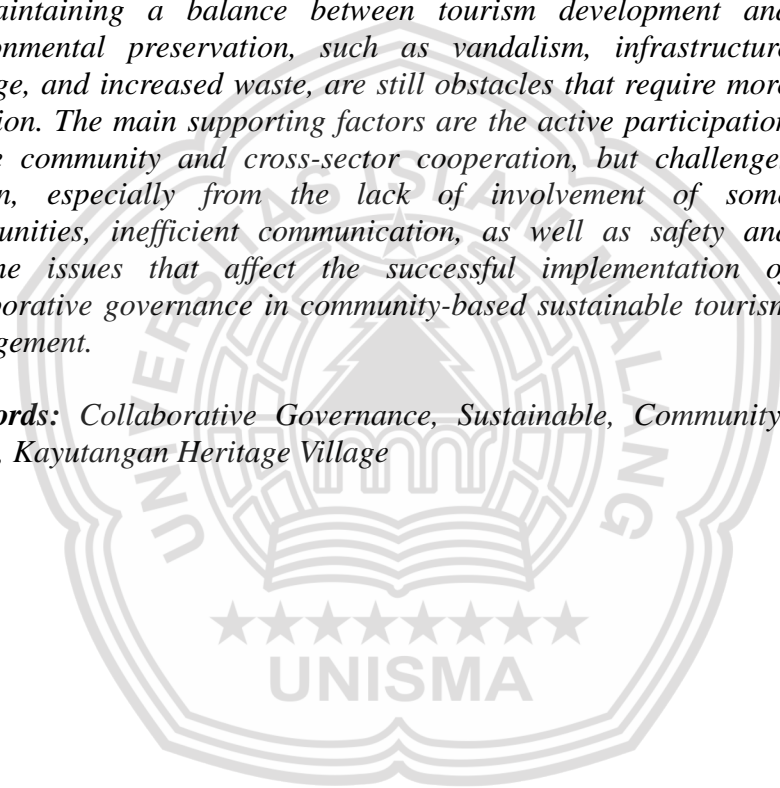
Salva Amalia Subekti, 2024, *Collaborative Governance in Community-Based Sustainable Tourism Management (Case Study of Kayutangan Heritage Village)*, (1) Dr. H. Slamet Muchsin, M.Si, (2) Retno Wulan Sekarsari, S.AP., M.AP., M.Pol.,Sc

Kayutangan Heritage Village is a village under the government of Malang City. Kayutangan Heritage Village is one of the villages whose concept has a historical Dutch colonial heritage which is strategically located in the kayutangan one-way street area. In the management of community-based sustainable tourism, three stakeholders are carried out, namely the community, the government and the private sector of Kayutangan heritage village. In the implementation of collaborative governance carried out by three stakeholders, it has had a lot of impact with the increase in UMKM from the community around the Kayutangan heritage village. The support from pokdarwis and the government in carrying out this management will continue to provide definite results for residents who feel the impact in Kayutangan heritage village.

Researchers used three main theories in this study. Collaborative Governance by Ansel Gash (in Astuti, et al., 2020) explains that Collaborative Governance is a method of government management that involves stakeholders outside the government's goal agencies, deliberating and agreeing on decision making with the implementation of public programs and policies. The second theory by Wheelen and Hunger (Abd. Rahman et al., 2017), which explains the processes of strategic management, namely environmental scanning, strategy formulation, strategy implementation, evaluation and control. The third theory by Ismayanti (2020) explains the impact of tourism, namely, economic, socio-cultural, sustainable environmental impacts. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected by interview, observation, and documentation, then analyzed in the style of Miles and Huberman. Researchers used seven informants from the government, tourism awareness groups, and the people of Kayutangan heritage village. Then, researchers checked the validity of the data with source triangulation, technique triangulation, and time triangulation.

The results showed that Collaborative Governance is carried out in a sustainable community-based manner in Kayutangan heritage village, which can be seen by the involvement of local people as MSME actors in tourist sites. In addition, in collaborative governance, the Kauman Village government or outside institutions such as the Tourism Office of Malang City, the Ministry of PUPR Malang City, and the Ministry of Tourism of the Republic of Indonesia, and tourism awareness groups, as well as the private sector managed to plan and implement several strategies in the future in the management of Kayutangan heritage village. Nonetheless, major challenges become an inhibiting factor in maintaining a balance between tourism development and environmental preservation, such as vandalism, infrastructure damage, and increased waste, are still obstacles that require more attention. The main supporting factors are the active participation of the community and cross-sector cooperation, but challenges remain, especially from the lack of involvement of some communities, inefficient communication, as well as safety and hygiene issues that affect the successful implementation of collaborative governance in community-based sustainable tourism management.

Keywords: *Collaborative Governance, Sustainable, Community-based, Kayutangan Heritage Village*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan aset alam, termasuk kekayaan keragaman geologi (*geodiversity*). Keragaman geologi ini, yang dikenal sebagai warisan geologi (*geoheritage*), memiliki nilai penting baik untuk pendidikan maupun sebagai aset pariwisata. Sebagai negara kepulauan yang luas, Indonesia memiliki sumber daya alam darat dan laut yang melimpah, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, luasnya wilayah Indonesia memberikan potensi besar untuk pengembangan objek wisata. Dengan kekayaan sumber daya alam ini, Indonesia memiliki modal kuat untuk mendukung pengembangan proyek pariwisata.

Di beberapa wilayah, pariwisata menjadi salah satu potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Pariwisata, selain menjadi alat untuk melestarikan kebudayaan, juga berperan penting dalam mempromosikan hasil budaya lokal. Menurut A.J. Burkart dan S. Medik (1981) dalam Soekadijo (2000), pariwisata didefinisikan sebagai aktivitas bepergian sementara ke tempat lain di luar lokasi tinggal dan bekerja seseorang. Sementara itu, menurut I Ketut Suwena dalam bukunya "Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata," pariwisata nasional mengacu pada jenis pariwisata yang berkembang dalam batas suatu negara, melibatkan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Sebagai

contoh, pariwisata di berbagai daerah di Indonesia merupakan salah satu bentuk pariwisata nasional.

Pariwisata adalah sektor ekonomi dengan potensi besar untuk meningkatkan pendapatan negara serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Di Indonesia, sektor ini juga menjadi andalan sebagai sumber pendapatan devisa dan penciptaan lapangan kerja. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan pariwisata dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti kerusakan lingkungan, konflik dengan masyarakat lokal, ketimpangan ekonomi, dan hilangnya nilai-nilai budaya tradisional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada partisipasi aktif masyarakat. Pendekatan ini melibatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, sehingga mereka dapat merasakan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya dari sektor pariwisata. Dengan melibatkan masyarakat, aspek-aspek keberlanjutan seperti pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pemeliharaan budaya dapat lebih terjamin. Namun, meskipun konsep pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat telah mendapatkan perhatian di tingkat global, implementasinya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

Berdasarkan UUD No. 14 Tahun 2016 mengenai Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, kriteria utama mencakup pengelolaan yang berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, pelestarian

budaya, serta perlindungan lingkungan. Pendekatan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat menjadi sangat penting di era globalisasi, dengan menekankan partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya alam dan budaya. Namun, penerapan pendekatan ini menghadapi beberapa tantangan, termasuk konflik kepentingan, kurangnya keterlibatan masyarakat, degradasi lingkungan, dan ketidakmerataan distribusi manfaat.

Pariwisata yang dikelola secara buruk dapat memicu eksploitasi sumber daya alam dan budaya, peningkatan tekanan terhadap lingkungan, serta ketidakadilan dalam pembagian peran. Selain itu, minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pariwisata menjadi isu penting. Partisipasi yang rendah dapat menurunkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pariwisata dan menghambat kemajuan pariwisata berkelanjutan.

Pengelolaan area wisata bertujuan untuk meningkatkan keindahan tempat wisata tanpa merusak ekosistem alam yang ada. Salah satu cara untuk memperluas jangkauan kawasan wisata agar lebih dikenal wisatawan, baik lokal maupun internasional, adalah melalui pengelolaan dan strategi pemasaran yang efektif. Beberapa kota besar di Indonesia memanfaatkan dan mengembangkan pariwisata alam sebagai daya tarik utama sekaligus aset penting untuk pendapatan daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa sektor pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan, memberikan kesempatan berusaha,

serta memperoleh manfaat, juga mampu menghadapi tantangan perubahan di tingkat lokal, nasional, dan global.

Tabel 1.1 Daftar Kampung Wisata di Kota Malang

No	Nama Kampung
1.	Kampung Heritage Kajoetangan
2.	Kampung Tridi
3.	Kampung Warna-Warni Jodipan
4.	Kampung Budaya Polowijen
5.	Kampung Keramik Dinoyo
6.	Kampung Tempe Sanan
7.	Glantung Go Green dan Water Street
8.	Kampung 1.000 topeng

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan luasnya penyebaran kampung wisata di Kota Malang, yang merupakan kota dengan potensi wisata perkampungan terbanyak pada tahun 2023. Hal ini mendorong pemerintah Kota Malang untuk memfokuskan pengembangan konsep pariwisata menuju kampung tematik. Di antara kampung-kampung tersebut, terdapat satu kampung bernama melesit tinggi, yang memiliki konsep perkampungan yang mengedepankan bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda, yaitu Kampung *Heritage*. Lokasi kampung ini sangat strategis, terletak di Jalan Kayutangan yang merupakan jalan satu arah dan dikelilingi oleh deretan kedai kopi.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan pengembangan pariwisata di Kota Malang, khususnya di Wisata Kampung *Heritage* Kayutangan. Kampung *Heritage* terletak di bawah naungan Pemerintah Kota Malang. Awalnya, salah satu anggota Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang mulai mengembangkan sebuah ide yang akhirnya memunculkan kelompok pengelola objek wisata ini, yaitu Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Dengan potensi wisatanya, Kampung *Heritage* menjadi kampung wisata yang memiliki nilai sejarah dan memberikan manfaat bagi pemerintah serta masyarakat setempat.

Kampung *Heritage* berada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang, dengan cakupan RT/RW yang cukup luas. Namun, kampung wisata ini hanya terdiri dari empat RW, yaitu RW 01, RW 02, RW 09, dan RW 10. Keberadaan Kampung *Heritage* dalam lanskap kota yang memiliki ciri peninggalan masa penjajahan kolonial, seperti yang terdapat di Malang, dapat dijadikan sebagai objek atraksi wisata sejarah yang menarik.

Pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan yang mendukung pengembangan sektor ini dengan memperhatikan aspek keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk memastikan bahwa pariwisata dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal, melestarikan kekayaan alam dan budaya, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, dalam praktiknya,

pariwisata berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat terwujud secara efektif.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah pertumbuhan yang tidak terkendali. Perkembangan pariwisata yang pesat dapat memberikan tekanan pada lingkungan, merusak warisan budaya, serta memicu konflik sosial dan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan publik di sektor ini harus dirumuskan melalui proses musyawarah yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah berperan sebagai mediator untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengambil keputusan kebijakan, sehingga dampak dari kebijakan tersebut dapat dirasakan langsung oleh mereka.

Terkait dengan kebijakan peningkatan produktivitas berdaya saing, terutama di sektor pariwisata, Pemerintah Kota Malang melalui Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018 mengungkapkan upaya untuk mengembangkan kawasan strategis di kota Malang. Salah satu langkah yang diambil adalah menetapkan, mempertahankan, dan merevitalisasi area yang memiliki nilai sejarah atau cagar budaya yang kuat. Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018, Kota Malang diakui sebagai bagian dari Hindia Belanda, mengingat kawasan ini berkembang setelah kedatangan penjajah Belanda.

Pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan dalam pengelolaan pariwisata yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya alam dan budaya, serta pembagian manfaat pariwisata yang adil. Namun, dalam implementasinya, pariwisata berbasis masyarakat menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi agar dapat mencapai keberhasilan.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat adalah rendahnya keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sering kali, masyarakat tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam pengelolaan pariwisata, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses manfaat ekonomi yang dihasilkan. Di samping itu, konflik kepentingan antara masyarakat lokal dan pemangku kepentingan pariwisata lainnya juga dapat muncul, yang mengancam keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat.

Secara umum, *Collaborative Governance* muncul sebagai suatu konsep yang dirancang secara sadar untuk mengatasi permasalahan yang menghambat suatu pekerjaan. *Collaborative governance* adalah proses yang melibatkan berbagai instansi untuk mencapai tujuan bersama. Mengingat keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah di tingkat lokal, diperlukan penggunaan perspektif *governance* untuk mendukung proses tersebut.

Pada dasarnya, *collaborative governance* adalah proses yang melibatkan berbagai aktor kebijakan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang

baik atau *good governance*. Secara tidak langsung, *collaborative governance* juga berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip *collaborative governance* sangat penting bagi pemerintah Indonesia, khususnya di sektor pariwisata.

Fokus dari *collaborative governance* adalah pada kebijakan dan isu yang terkait dengan objek wisata. Institusi publik memiliki orientasi besar dalam pembuatan kebijakan, dengan tujuan dan proses kolaborasi yang bertujuan mencapai konsensus di antara para pemangku kepentingan. *Collaborative governance* berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam memenuhi kepentingan masyarakat.

Salah satu langkah untuk memastikan bahwa sektor objek wisata dapat meningkatkan perekonomian, sosial, dan lingkungan adalah dengan melakukan pengelolaan yang efektif terhadap objek wisata tersebut. Dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, penting untuk ada koordinasi, kerja sama, dan peran yang seimbang antara berbagai unsur pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Konsep wisata Kampung *Heritage* berlandaskan prinsip pembangunan pariwisata "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat." Dalam setiap tahap pembangunan pariwisata, mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, hingga pengembangan, serta pemantauan dan evaluasi, masyarakat dilibatkan secara aktif dan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Tujuan akhir dari proses ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Masyarakat berperan sebagai

pelaku utama dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat, terlibat dalam semua aspek pembangunan sebagai perencana, investor, pelaksana, pengelola, dan pemantau.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat menekankan pada peran masyarakat sebagai komponen utama, meskipun keterlibatan pemerintah dan swasta juga sangat penting. Peran masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan budaya yang berpotensi menjadi daya tarik wisata sangat krusial. Oleh karena itu, upaya untuk memberdayakan masyarakat setempat dengan melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan pembangunan pariwisata harus diutamakan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai fasilitator dan pemangku kepentingan perlu mendorong dan memotivasi masyarakat agar bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan objek wisata Kampung Heritage di Kota Malang.

Tabel 1.2. Total pengunjung Kampung Heritage disepanjang tahun 2018-2024

Tahun	Wisatawan Lokal	Wisatawan Mancanegara	Total
2018	3.512	27	3539
2019	94.556	224	94.780
2020	8.534	27	8.561
2021	423	0	423
2022	3.672	92	3.764
2023	83.795	932	84.727
Januari 2024	10551	119	10.670

Sumber: data diolah peneliti, 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa kedatangan wisatawan domestik dan mancanegara memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan Kampung *Heritage*. Pengelolaan dan perkembangan objek wisata ini merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan wilayah. Dengan pengelolaan yang baik, objek wisata dapat berkembang optimal, yang pada gilirannya akan memberikan kesejahteraan yang adil kepada masyarakat setempat. Apabila kegiatan wisata memberikan dampak positif bagi masyarakat, maka hal ini akan menumbuhkan rasa peduli dan sikap untuk menjaga objek wisata tersebut dari kerusakan.

Dampak pengelolaan wisata juga memberikan peluang berharga bagi masyarakat yang membutuhkan. Jika pengelolaan pariwisata dilakukan secara maksimal, maka akan tercipta lapangan kerja baru, meningkatkan kegiatan pembangunan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, yang pada akhirnya akan menyejahterakan perekonomian masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan di setiap objek wisata, sehingga solusi dapat ditemukan. Dengan demikian, pariwisata menjadi salah satu subsektor ekonomi yang dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi, pariwisata memberikan kontribusi dalam bentuk penerimaan daerah melalui pajak, retribusi parkir, dan penjualan tiket, serta dapat menghasilkan devisa dari wisatawan asing yang berkunjung.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengelola Wisata Kampung *Heritage*

Kayutangan dengan baik, mengingat banyak masyarakat yang bergantung pada tempat ini untuk mencari nafkah. Ini mencakup penyediaan tempat berjualan dan pengelolaan keamanan kampung yang terjamin agar wisatawan merasa aman saat berkunjung. Selain itu, kebersihan kampung juga harus diperhatikan. Pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat dalam pengelolaan Kampung *Heritage* Kayutangan untuk memaksimalkan kinerjanya.

Dengan semakin banyaknya wisatawan, kondisi ini memerlukan perhatian untuk memperbaiki pengelolaan yang ada. Semua pihak perlu menyadari pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pihak non-pemerintah dalam mengelola pariwisata secara optimal. Dalam konteks *collaborative governance*, baik pemerintah maupun non-pemerintah harus aktif berpartisipasi. Dengan demikian, pariwisata dapat berkembang sesuai harapan dan memberikan manfaat yang maksimal.

Permasalahan yang terkait dengan *collaborative governance* dalam pengelolaan Wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang adalah mengenai bagaimana cara kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan pengelola objek wisata. Masalah ini muncul akibat adanya akar permasalahan yang penulis temukan di lapangan, yaitu:

1. Kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan. Objek di Kampung *Heritage* tidak hanya mencakup lingkup RW yang kecil, tetapi semakin banyak pelaku pengelola wisata dapat mempermudah proses kolaborasi. Namun, beberapa anggota masyarakat

kurang bersemangat terhadap keberadaan Kampung *Heritage* di wilayah RW 02, karena mereka masih mempertanyakan apakah keberadaan perkampungan wisata tersebut akan menguntungkan bagi masyarakat setempat. Terdapat informasi bahwa di depan rumah warga RW 02 terdapat tulisan yang melarang penjualan. Keputusan tersebut telah disepakati oleh seluruh warga di RW itu. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Ketua RW 01, Pak Mahmud.

“Dari sekian 4 RW, ada salah satu RW yang istilahnya masih rewel dengan berdirinya wisata perkampungan ini. Ketua RW nya pun kurang ikut dalam pengelolaan, salah satu contohnya tidak adanya pelaku UMKM di wilayah RW 02 karena mereka berfikir masih ragu apakah ada keuntungan yang dapat dihasilkan di wilayah RW nya”

Untuk itu, kurangnya dukungan dari salah satu RW yang menjadikan pengelolaan menjadi kurang sempurna karena keterlibatan perlu dilakukan dari berbagai *stakeholders* di obyek wisata Kampung *Heritage*. Hal itu serupa dikatakan pekerja di kampung heritage sebagai *ticketing*, Bu Darmi mengatakan

“Masyarakat RW 02 itu tidak mau perkampungannya ramai dikunjungi banyak orang karena apa mereka menganggap bahwa kampung merupakan sebuah privasi yang tidak untuk dikunjungi orang dari luar daerah maupun mancanegara”

2. Minimnya dukungan dan kolaborasi dari kelurahan dalam pengelolaan objek wisata di Kampung *Heritage*. Selama ini, tidak ada sosialisasi dari pihak kelurahan untuk mendorong masyarakat melakukan kolaborasi dalam pengembangan wisata. Akibatnya, pihak kelurahan hanya ikut memanfaatkan nama Kampung *Heritage* tanpa terlibat aktif dalam pengelolaannya. Pernyataan ini dikuatkan oleh Ketua RW 10, Pak

Mahmud.

“Kalau sama kelurahan dirasa hanya melihat saja, dalam artian cuma nimbrung waktu ada peresmian kaya misalnya kemarin ada pak Menteri mau datang kesini, wah langsung dibenahi semua. Ketika pak Menteri pulang yaudah kembali seperti semula””

Selain Pak Mahmud, Bu Mila selaku Ketua Pokdarwis Kampung

Heritage juga membeberkan hal itu. Bu Mila mengatakan

“Iya betul, pihak kelurahan pun kurang terjun didalam pengelolaan obyek wisata kampung ini. Keterlibatan mereka sejauh ini hanya memantau saja. Seperti halnya kami tim pokdarwis memerlukan sosialisasi terkait bagaimana cara pengelolaan sebuah kampung wisata. Dengan itu awalnya kami kesusahan tidak ada sosialisasi dari atasan atau arahan, maka kami pun berjalan secara otodidak””

Masyarakat yang kurang aktif dan kurangnya upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan desa wisata yang berkelanjutan berbasis masyarakat menyebabkan kolaborasi tidak berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan bagi peneliti untuk mengambil judul “*COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA BERKELANJUTAN BERBASIS MASYARAKAT (Studi Kasus Kampung *Heritage* Kota Malang).”

B. Rumusan Masalah

Dari konteks penelitian atau latar belakang diatas, terdapat perumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance* ?
2. Bagaimana dampak pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance* ?

3. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan objek wisata berbasis *Collaborative Governance* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan strategi kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.
- b. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis efek kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.
- c. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kolaborasi dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di bidang Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.
- b. Untuk memperoleh wawasan, pengetahuan, serta pemahaman penulis di bidang Administrasi Publik, khususnya untuk mengatasi masalah-masalah administrasi yang terjadi di masyarakat.

- c. Menerapkan ilmu dan teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.



D. Manfaat Penelitian

Tercapainya tujuan penelitian yang telah disebutkan diatas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang dapat dipergunakan dalam penelitian karya ilmiah di bidang Ilmu Administrasi.

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* Di Kota Malang agar tercipta kolaborasi yang lebih baik kedepannya.
- b. Untuk lebih memahami teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai *Collaborative Governance* dalam pengelolaan objek wisata Kampung *Heritage* di Kota Malang.
- b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa pemikiran maupun tindakan bagi Wisata Kampung *Heritage* Kota Malang.

BAB 7

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Kampung Heritage Kayutangan)”, maka peneliti dapat mengambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Terkait rumusan masalah pertama, yaitu strategi pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kampung Heritage Kayutangan. Pengelolaan pariwisata di Kampung Heritage Kayutangan berbasis *collaborative governance*, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta. Pemerintah RW dan Desa Kauman telah melaksanakan rencana yang mencakup pelatihan masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia bagi pariwisata berkelanjutan. Lebih jauh, upaya pengelolaan difokuskan pada penguatan ekonomi lokal, khususnya dengan mendukung UKM, untuk memastikan keberlanjutan dan pemeliharaan potensi wisata.
2. Terkait rumusan masalah kedua, yaitu dampak pengelolaan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kampung Heritage Kayutangan: Manfaat manajemen berbasis *collaborative governance* terlihat jelas dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai

hasil dari partisipasi aktif dalam manajemen pariwisata. Namun, menjaga keseimbangan antara perluasan pariwisata dan pelestarian lingkungan menghadirkan kendala substansial, seperti vandalisme dan kerusakan infrastruktur yang disebabkan oleh banyaknya wisatawan. Konsekuensi negatif lainnya termasuk peningkatan sampah, yang memerlukan peningkatan manajemen lingkungan dan infrastruktur.

3. Terkait faktor pendukung dan penghambat pengelolaan objek wisata berbasis *collaborative governance* di Kampung Heritage Kayutangan. Baik faktor pendukung maupun penghambat memiliki dampak signifikan terhadap kinerja manajemen pariwisata berbasis *collaborative governance*. Keterlibatan masyarakat secara aktif dan kolaborasi dengan banyak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan sektor komersial, merupakan sumber dukungan utama. Keinginan kuat masyarakat untuk menerima perubahan dan berpartisipasi aktif dalam manajemen pariwisata merupakan aset berharga yang mendorong keberhasilan *collaborative governance*. Namun, masalah yang cukup besar muncul dari tidak adanya keterlibatan oleh beberapa anggota masyarakat yang tidak sepenuhnya mendukung kegiatan manajemen pariwisata. Lebih jauh lagi, komunikasi yang tidak efisien antara manajemen dan masyarakat sering kali menghambat koordinasi dan pelaksanaan kebijakan manajemen yang tepat. Kesulitan tambahan meliputi

keamanan, kebersihan, dan pemahaman wisatawan tentang pengelolaan lingkungan, yang semuanya menawarkan tantangan untuk mewujudkan potensi penuh *collaborative governance* dalam manajemen pariwisata.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat di Kampung Heritage Kayutangan ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Memperkuat Kolaborasi Pemerintah, Pihak Swasta, dan Masyarakat

Kolaborasi antara pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat setempat dalam mengelola pariwisata di Kampung Heritage Kayutangan telah memberikan manfaat bagi perekonomian setempat. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi antar pihak perlu diperkuat melalui teknik yang lebih terarah seperti pengembangan rencana kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan secara transparan dan berkelanjutan.

2. Pengembangan Produk Wisata dan UMKM

Pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata setempat harus bekerja sama dengan UMKM untuk mengembangkan pariwisata dan produk lokal. Rencana yang dapat ditindaklanjuti adalah memperluas pemasaran produk melalui digitalisasi dan e-commerce sekaligus meningkatkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar. Hubungan ini akan secara langsung menguntungkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru.

3. Penanganan Dampak Negatif dan Permasalahan Pengelolaan Wisata

Untuk mengatasi dampak negatif seperti masuknya budaya lain dan pengelolaan sampah yang buruk, diperlukan kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan kelompok peduli lingkungan. Strategi yang dapat diterapkan meliputi inisiatif sosialisasi tentang lingkungan bagi penduduk setempat, serta aturan yang ketat untuk menjaga kebersihan dan melestarikan budaya setempat. Sektor swasta juga dapat membantu pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan dengan menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

4. Pengembangan Wisata sebagai Pilar Ekonomi Lokal

Pengembangan UMKM di Kampung Heritage Kayutangan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memberikan pelatihan usaha dan akses permodalan kepada para pelaku UMKM. Cara ini akan memberikan dampak positif dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunkan angka pengangguran, dan mendiversifikasi penawaran wisata yang menarik minat wisatawan.

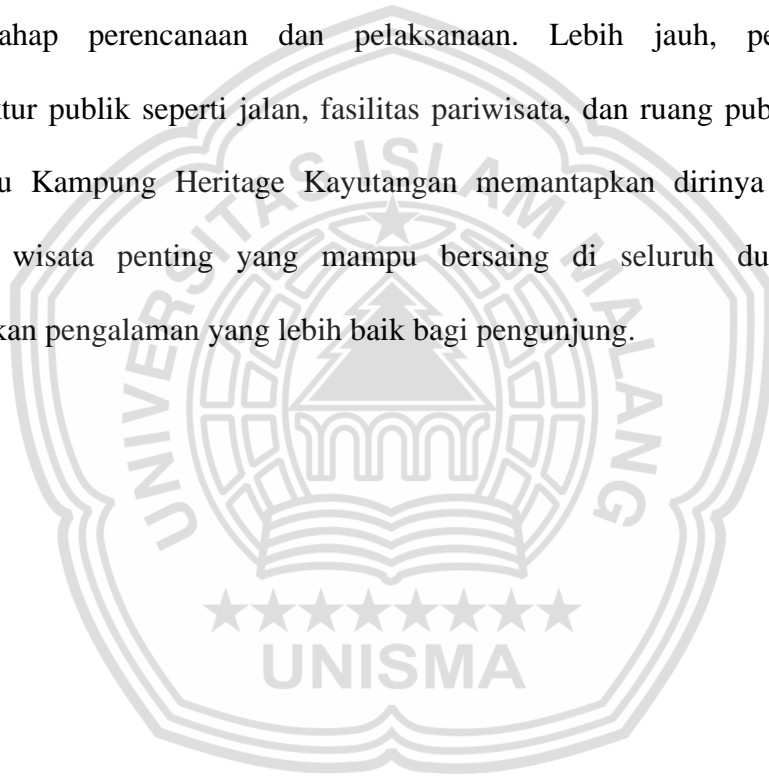
5. Meningkatkan Kerja Sama dengan Sektor Swasta

Kerja sama dengan Pihak Swasta, seperti Cat Dulux, yang mendanai proyek mural di Kampung Heritage Kayutangan, merupakan contoh kerja sama tim yang baik. Di masa mendatang, koordinasi dengan mitra sektor swasta harus diperkuat melalui skema sponsor untuk mendanai peningkatan infrastruktur dan estetika di wilayah tersebut. Dampak dari strategi ini adalah untuk meningkatkan daya tarik wisata, yang akan berujung pada peningkatan

jumlah pengunjung dan pendapatan pariwisata.

6. Pelestarian Kearifan Lokal dan Peningkatan Infrastruktur

Pelestarian benda-benda bersejarah dan bangunan khas Kampung Heritage Kayutangan harus menjadi prioritas utama dalam setiap strategi pengelolaan. Pendekatan pelestarian ini dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga budaya dan masyarakat setempat, serta partisipasi masyarakat di semua tahap perencanaan dan pelaksanaan. Lebih jauh, penguatan infrastruktur publik seperti jalan, fasilitas pariwisata, dan ruang publik akan membantu Kampung Heritage Kayutangan memantapkan dirinya sebagai destinasi wisata penting yang mampu bersaing di seluruh dunia dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Ahadiat, Ayi. 2010. *Manajemen Strategik: Tinjauan Teoritis Multi Perspektif*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Eka, Yudha Nugraha. 2021. *Buku Ajar Pariwisata Berbasis Masyarakat: Konsep dan Praktik*. Purwokerto Selatan. CV. Pena Persada.
- Fathoni, M. 2023. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Sumatra barat: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim. Cetakan keempat
- Handayani Asih., Eddy Sarwono Aris. (2021). *Buku Ajar Manajemen Strategis*. Surakarta. Unisri Press.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif*. Wal ashri Publishing. Sumatera Utara.
- Ketut Suwena, I. 2017. *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. Bali. Universitas Udayana Denpasar.
- Nazarudin. 2018. *Manajemen Strategik*. Palembang. CV. Amanah.
- Noor, Muhammad. 2020. *COLLABORATIVE GOVERNANCE: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praktik*. Yogyakarta. CV. Bildung Nusantara.
- Nugroho, R. 2020. *Collaborative Governance dalam Perspektif Administrasi Publik*. Semarang. Universitas Diponegoro Press.
- Nyoman, I ,Sukma. *Buku Ajar: Pariwisata Berkelanjutan*. Sustain-Press.
- Mahriani, Elida. 2020. *Manajemen Pariwisata: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Bandung. Widina Bhakti Persada.
- Miles, M.B dan A.M Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muryani, Chatarina. 2020. *Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta. CV. Pramudita Press.

- Persada, Citra. 2018. *Perencanaan Pariwisata Dalam Pembangunan Wilayah Berkelanjutan; Teori dan Praktik*. Bandarlampung. Universitas Lampung.
- Rahman, Abd., Radjab E. 2016. *Manajemen Strategi*. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rohman, Abd. 2017. *Dasar-Dasar Manajemen*. Malang. Inteligencia Media.
- Sudiantini, Dian. (2022). *Manajemen Strategi*. Banyumas. CV. Pena Persada.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarta, Nyoman. 2017. *Pariwisata Berkelanjutan*. Bali. Cakra Press.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Yatminiwati, Mimin. 2019. *Manajemen Strategi: Buku Ajar Perkuliahan Bagi Mahasiswa*. Lumajang. Widya Gama Press.

Sumber Jurnal/Skripsi :

- Aulia, Irfan. 2020. Pengaruh Pariwisata Berkelanjutan Terhadap Pendapatan Masyarakat Gampong Nusa Aceh Besar. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Aini Miftakhul., Afifuddin., Wulan Sekarsari Retno. (2022). Analisis SWOT Strategi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Malang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Respon Publik*. 16 (4) : 16-24.
- Alisa Shinta P., Muchsin Slamet., Wulan Sekarsari Retno. (2023). Dampak Pembangunan Wisata Kayutangan Heritage Terhadap Kawasan Kumuh Di Daerah Kayutangan Kota Malang (Studi Kasus Zona II Wisata Kayutangan Heritage Kota Malang). *Jurnal Respon Publik*. 1 (11) : 62-70.

- Aisyah Riska., Muchsin Slamet., Khoiron. (2021). Strategi Pengembangan Destinasi Wisata Kali Cemplong Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. *Jurnal Respon Publik*. 15 (5): 30-37.
- Agung Achmad., Muchsin Slamet., Zainal Agus. (2022). Pengembangan Menuju Desa Wisata Di Desa Penambangan Guna Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Di Desa Penambangan Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Respon Publik*. 16 (10) : 27-33.
- Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2019). Tata Kelola Destinasi Pariwisata: Kerangka Analisis. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*. 27 (9) : 1109-1128.
- Delpiero Ginting, M. D. Pendekatan *Collaborative Governance* Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Goa Putri Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Asdaf Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Program Studi Politik Indonesia Terapan.
- Effendi, M (2021). Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Ekowisata Mangrove di Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*. 105-138
- Hasanah Mauizatul. 2017. Pengelolaan Pariwisata Alam Berbasis Masyarakat (Kasus Objek Wisata Alam Rammang-Rammang Desa Salenrang Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi). Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Haryono, N. (2012). Jejaring untuk membangun kolaborasi sektor publik. *Jurnal Jejaring Administrasi Publik*.
- I Wayan Raymundus R. (2018). Perencanaan Manajemen Strategis Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai (Studi Kasus pada KRL Commuter Liner Bogor-Jakarta). *Bussiness Management Journal*. 14 (2) :75-153.
- Jamal, TB. (2009). Teori kolaborasi dan praktik pariwisata di kawasan lindung: Pemangku kepentingan, penataan dan keberlanjutan. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*. 17(2) : 169-189.
- Junita Frida., Umi Nurul., Wulan Sekarsari Retno. (2023). Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPOPAR) dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo, Jawa Timur. *Jurnal Respon Publik*. 17 (13) : 57-69.

- Kurniawan, T. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 7 (1) : 16-17.
- Kusuma Indra P., Muchsin Slamet., Zainal Agus. (2022). Strategi Pengelolaan Wisata Buper Bedengan Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Perum Perhutani KPH Malang dan Pengelola Wisata (Studi Kasus Wisata Buper Bedengan Desa Solorejo Kecamatan Dau Kabupaten Malang). *Jurnal Respon Publik*. 16 (7) : 34-41.
- Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Universitas Muhammadiyah Makassar. unismuh.ac.id.
- Nawawi, Ahmad, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Depok di Desa Kretek Parangkritis. *Jurnal Nasional Pariwisata*. Vol.5 No.2.
- Rachmadi, Hari. 2016. Model Pengambilan Keputusan Berwisata. *Jurnal Media Wisata*. Volume 14, Nomor 2.
- Raharjana, D. T. (2005). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya (Kajian Etnoekologi Masyarakat Dusun Ketingan, Desa Tirtoadi, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman di Yogyakarta. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Winarno Tedy., Wulan, Sekarsari Retno. 2018. Smart Kampung Sebagai Wujud Kemajuan Sistem Administrasi Dan Manajemen Di Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi. *Journal of Public Sector Innovations*. 2 (2) : 82-87.
- Susilawati, 2016. Strategi Pengembangan Pariwisata Pantai Bira Sebagai Sumber Unggulan Pendapatan Asli Didaerah Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol.2 No.3.
- Saukad Rudi, Muhammad. 2023. Manajemen Pariwisata Religi Berbasis Moderasi Beragama Di Islamic Center Mataram. *Jurnal Manajemen Dakwah*. Universitas Islam Negeri Mataram. uinmataram.ac.id.
- Yulyana Dewi, L. N. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. undiknas.ac.id.

Zaenuri, Muhammad. 2016. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance: Studi Kasus Pariwisata-Bencana Lava Tour Merapi Kabupaten Sleman. Universitas Brawijaya Malang. Ub.ac.id.

Zaenuri, Muchamad. 2017. Tata Kelola Pariwisata-Bencana Dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Pariwisata-Bencana Volcano Tour Merapi di Kabupaten Sleman). Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.

Sumber Website:

Copyright (2022). Politeknik Negeri Malang. Sejarah Kampoeng Heritage

Kajoetangan. <https://www.heritage-kajoetangan.com/profil> (Diakses 15 Oktober 2023)

Pemerintah Kota Malang. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik. (2021). Pesona dan Cerita Bangunan Tua Kampung Kayutangan Malang. <https://malangkota.go.id/2021/08/05/pesona-dan-cerita-bangunan-tua-kampung-kayutangan-malang/> (Diakses 20 Oktober 2023)

Puspaningtyas, Anggraeny. (2022). Collaborative Governance: Sebuah Paradigma?. <https://publik.untag-sby.ac.id/berita-430-collaborative-governance-sebuah-paradigma.html> (Diakses 15 Oktober 2023)

Hidayah, Nurdin. (2023). *Manajemen Destinasi Pariwisata: Konsep, Filosofi, Teori dan Fungsinya*. <https://pemasaranpariwisata.com/2023/01/09/manajemen-destinasi-pariwisata/> (Diakses 17 Maret 2024)

Sumber Undang-Undang:

UU No. 10 Tahun 2009. (2009). "Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Database Peraturan | JDIH BPK

Pemerintah Walikota Malang. (2017). Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Malang. (2021). Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35).



Peraturan Menteri Pariwisata. (2016). Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pariwisata Berkelanjutan. Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

PERMEN PAR No.14 Thn 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

